

BAB III

LATAR BELAKANG TERJADINYA PERANG BOSNIA

3.1 Latar Belakang Perang

Perang Bosnia-Herzegovina yang berlangsung dari tahun 1992 hingga 1995 merupakan salah satu konflik paling berdarah dan kompleks di Eropa pasca-Perang Dunia II. Konflik ini tidak hanya menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dan lebih dari dua juta orang kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menjadi cerminan dari rapuhnya tatanan politik pasca-Perang Dingin serta kegagalan komunitas internasional dalam mengantisipasi dan menengahi konflik berbasis etno-nasionalisme yang ekstrem.

Akar konflik Bosnia dapat ditelusuri hingga keruntuhan Republik Federal Sosialis Yugoslavia, negara multi-etnis yang dibentuk setelah Perang Dunia II dan terdiri atas enam republik: Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Yugoslavia yang sebelumnya berhasil dipersatukan oleh kepemimpinan karismatik Josip Broz Tito, mulai mengalami perpecahan setelah kematiannya pada tahun 1980. Tito memerintah dengan sistem pemerintahan sentralistik dan represif yang mampu meredam ketegangan antar-etnis, namun sepeninggalnya, berbagai sentimen nasionalisme dan separatisme kembali mencuat.

Krisis ekonomi yang melanda Yugoslavia pada 1980-an, disertai dengan ketimpangan pembangunan antar-republik, mempercepat keretakan internal. Republik-republik yang lebih maju secara ekonomi seperti Slovenia dan Kroasia merasa terbebani oleh sistem redistribusi federal yang menguntungkan Serbia.

Hal ini diperparah oleh munculnya elit-elit politik baru yang mengeksploitasi identitas etnis untuk memperkuat basis kekuasaan mereka. Slobodan Milošević di Serbia menjadi simbol kebangkitan nasionalisme Serbia yang agresif, dengan ambisi membentuk Serbia Raya.

Pada awal 1990-an, Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan, memicu konflik bersenjata dengan Tentara Rakyat Yugoslavia (JNA) yang didominasi oleh etnis Serbia. Bosnia-Herzegovina sebagai republik yang paling heterogen secara etnis sekitar 43% Muslim Bosnia (Bosniak), 31% Serbia Bosnia, dan 17% Kroat Bosnia menjadi medan tempur paling kompleks. Referendum kemerdekaan yang digelar pada Maret 1992 didukung oleh mayoritas Bosniak dan Kroat, namun diboikot oleh etnis Serbia. Bosnia pun memproklamasikan kemerdekaan, yang kemudian dibalas dengan agresi militer oleh Serbia Bosnia dengan dukungan dari Beograd dan JNA.

Menurut teori politik realis seperti yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau, perang ini mencerminkan konflik kekuasaan dalam sistem internasional anarki, di mana negara dan aktor-aktor dominan berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Serbia melihat kemerdekaan Bosnia sebagai ancaman terhadap hegemoni geopolitikanya, dan oleh karena itu berusaha merebut wilayah-wilayah strategis yang didominasi oleh etnis Serbia. Di sisi lain, Kroat Bosnia juga memperlihatkan kecenderungan untuk membentuk entitas otonom yang mungkin bergabung dengan Kroasia.

Dengan kekacauan politik, kekosongan institusional, dan bangkitnya identitas primordial, Perang Bosnia menjadi tragedi multidimensi yang

menampilkan wajah terburuk dari konflik etnis modern. Dalam perspektif Johan Galtung, situasi ini menggambarkan "konflik struktural", di mana ketidakadilan dan dominasi sistemik menimbulkan kekerasan. Alija Izetbegović sebagai Presiden Bosnia harus memainkan peran strategis dalam mempertahankan integritas negara, baik melalui diplomasi internasional maupun perlawanan bersenjata.

3.2 Geopolitik

Sejak awal pecahnya perang pada 1992, dinamika konflik Bosnia tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan posisi geopolitik aktor-aktor internasional. Konflik ini berlangsung di jantung Eropa, di wilayah yang strategis bagi stabilitas Balkan dan kawasan Mediterania. Oleh karena itu, berbagai kekuatan internasional, termasuk PBB, NATO, Uni Eropa, dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman, terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penyelesaian konflik.

Intervensi internasional selama dua tahun pertama konflik menunjukkan lemahnya konsensus global dalam menangani krisis Bosnia. PBB membentuk United Nations Protection Force (UNPROFOR) dengan mandat terbatas yang tidak memungkinkan intervensi militer aktif. Akibatnya, misi perdamaian ini gagal melindungi warga sipil dan hanya menjadi saksi atas kejahatan kemanusiaan seperti pengepungan Sarajevo dan pembantaian di Srebrenica.

Uni Eropa terpecah dalam menyikapi krisis. Sementara Jerman dan beberapa negara Skandinavia mendorong pengakuan terhadap kemerdekaan Bosnia, negara-negara seperti Inggris dan Prancis lebih berhati-hati dan

mendukung solusi diplomatik yang mengakomodasi kepentingan Serbia. Amerika Serikat yang pada awalnya bersikap pasif, mulai mengambil peran lebih besar setelah tahun 1994, seiring dengan tekanan publik dan laporan-laporan pelanggaran HAM yang masif.

Tragedi Srebrenica pada Juli 1995 menjadi titik balik dalam keterlibatan internasional. Pembantaian lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim di zona aman PBB oleh pasukan Serbia Bosnia menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. NATO merespons dengan meluncurkan Operasi Deliberate Force, kampanye serangan udara terhadap posisi militer Serbia Bosnia, yang disusul oleh serangan darat dari pasukan gabungan ABiH dan HVO.

Perubahan lanskap militer ini mempercepat proses negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat. Perundingan yang dipimpin oleh Richard Holbrooke di Dayton, Ohio, menghasilkan Perjanjian Damai Dayton pada Desember 1995. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata dan membagi Bosnia menjadi dua entitas: Federasi Bosnia dan Herzegovina serta Republika Srpska. Meskipun berhasil menghentikan perang, struktur politik hasil Dayton sangat kompleks dan memperkuat segregasi etnis.

Keterlibatan internasional dalam konflik Bosnia memperlihatkan kontradiksi antara prinsip kemanusiaan dan kepentingan geopolitik. Penundaan dalam pengambilan keputusan, rivalitas antara kekuatan Barat dan kegagalan PBB untuk bertindak tegas menjadi pelajaran pahit bahwa netralitas dalam konflik genosida dapat berujung pada pembiaran terhadap kejahatan massal.

3.3 Konflik Kelompok

Salah satu babak paling kompleks dari Perang Bosnia adalah konflik internal antara dua sekutu awal, yaitu Muslim Bosnia (Bosniak) dan Kroat Bosnia, yang pecah secara terbuka pada tahun 1993. Awalnya kedua kelompok membentuk aliansi militer-politik dalam menghadapi agresi Serbia Bosnia. Namun, perbedaan visi politik, perebutan wilayah, dan tekanan demografis menyebabkan pecahnya koalisi tersebut, terutama di wilayah strategis Bosnia Tengah.

Bosnia Tengah mencakup daerah-daerah seperti Travnik, Vitez, Busovača, dan Lembah Lašva. Kawasan ini vital karena letaknya yang menghubungkan utara dan selatan serta mengandung fasilitas militer era Yugoslavia. Ketegangan meningkat ketika pengungsi Muslim dari wilayah-wilayah yang dikuasai Serbia masuk ke kawasan yang dikuasai Kroat, menimbulkan konflik sumber daya dan perubahan demografi yang memicu ketakutan di kalangan HVO.

Pasukan HVO mulai membentuk administrasi terpisah bernama Herceg-Bosna, yang oleh pihak Bosniak dianggap sebagai ancaman terhadap integritas nasional. Bentrokan bersenjata pecah pada awal 1993 dan memuncak pada pembantaian Ahmići, di mana lebih dari 100 warga Muslim dibunuh oleh milisi HVO. ARBiH dan HVO saling melakukan pengepungan, serangan, dan pembersihan etnis. Kedua pihak dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan.

Pecahnya aliansi Muslim-Kroat memperluas lingkup konflik dan menyulitkan pemetaan diplomatik internasional, yang semula hanya melihat perang sebagai konflik antara Bosnia dan Serbia. Dalam konteks ini, upaya

mediasi oleh Amerika Serikat menghasilkan Perjanjian Washington pada Maret 1994. Perjanjian ini mengakhiri konflik Muslim-Kroat dan membentuk Federasi Bosnia dan Herzegovina, yang menjadi dasar aliansi baru dalam menghadapi Serbia Bosnia.

Meskipun aliansi dipulihkan, ketegangan antar-komunitas tetap berlangsung lama. Proses integrasi pasca-perjanjian berlangsung lambat, terutama di kota-kota yang pernah menjadi pusat konflik. Konflik ini menunjukkan bahwa perang tidak semata dimotivasi oleh etnisitas, tetapi juga oleh kalkulasi politik, penguasaan sumber daya, dan dinamika pragmatis di medan perang. Bosnia Tengah menjadi cerminan dari kompleksitas konflik Bosnia secara keseluruhan: bukan sekadar perang antar-identitas, melainkan juga kontestasi kepentingan dalam kondisi negara yang runtuh. Konflik kelompok ini tidak hanya menyebabkan kehancuran fisik, tetapi juga menciptakan luka sosial dan trauma kolektif yang mendalam, yang proses penyembuhannya masih terus berlangsung hingga hari ini.